

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**ASLI**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 241-06-28/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai GARUDA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	termohon
NOMOR	241 06 28 /PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .... memberi kuasa kepada:

- |    |  |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Zahru Arqom, SH., MH.Lit                 | NIA : 02.11294               |
| 2  | Imam Munandar, SH.                       | NIA : 13.00338               |
| 3  | Tito Prayogi, SHI., SH., MH.             | NIA : 14.02073               |
| 4  | Akhmad Jazuli, SH., MH.                  | NIA : 00.12190               |
| 5  | Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.        | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6  | Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054               |
| 7  | Muhammad Adi Sunata, SH.                 | NIA : 12.00040               |
| 8  | Herlin Susanto, SH.                      | NIA : 13.00298               |
| 9  | Nora Herlianto, SH.                      | NIA : 10.02186               |
| 10 | Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.           | NIA : 19.01290               |
| 11 | Yuni Iswantoro, SH.                      | NIA : 18.00843               |
| 12 | M. Mukhlasir. R.S.K, SH.                 | NIA : 18.00802               |
| 13 | Bagus Setiawan, SH.                      | NIA : 19.01189               |
| 14 | Ahmad Ali Fahmi, SH.                     | NIA : 12.00053               |
| 15 | Muhammad Arifuddin, SH.                  | NIA :                        |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

16 Wilhelmus Rio Resandhi, SH.

NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1—DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG.
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam permohonannya

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### **2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **2.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MAMASA DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMASA**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**2.1.1.1. Terjadi Pengelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk partai perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa**

1. Bahwa TERMOHON menyangkal semua dalil PEMOHON dalam permohonannya kecuali sepanjang dianggap benar oleh TERMOHON.
2. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DB1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam table Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON		
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle	2.020	76	491	DA1
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1
3	Kecamatan Bambang		388	57	DA1
4	Kecamatan Mambi		89	159	DA1
5	Kecamatan Mehalaan		42	99	DA1
6	Kecamatan Rante Bulahan Timur		233	107	DA1
7	Kecamatan Tabulahan		258	190	DA1
	Jumlah			1.375	1.350



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle		76	491	DA1
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1

4. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3 , untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DAA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle				
	1 Desa Aralle		30	70	DAA1
	2 Desa Ralle Anak		0	8	DAA1
	3 Desa Panetean		10	38	DAA1
	4 Desa Uhailanu		7	16	DAA1
	5 Desa Aralle Utara		12	17	DAA1
	6 Desa Uhaidao		1	146	DAA1
	7 Desa Baruru		7	54	DAA1
	8 Desa Ralle Anak Utara		1	20	DAA1
	9 Desa Pamoseang Pangga		0	46	DAA1
	10 Desa Aralle Selatan		4	0	DAA1
	11 Desa Hahangan		4	8	DAA1
	12 Desa Kala'be		0	68	DAA1

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>491</b>	<b>DAA1</b>
2	Kecamatan Buntu Malangka				
1	Desa Bumal		4	4	DAA1
2	Desa Salutambun		11	6	DAA1
3	Desa Aralle Timur		6	70	DAA1
4	Desa Kabae		191	57	DAA1
5	Desa Kebanga		35	8	DAA1
6	Desa Penatangan		4	17	DAA1
7	Desa Salutambun Timur		8	25	DAA1
8	Desa taora		0	2	DAA1
9	Desa Rante Berang		11	12	DAA1
10	Desa Salurinduk		1	1	DAA1
11	Desa Salutambun Barat		18	45	DAA1
	<b>Jumlah</b>		<b>289</b>	<b>247</b>	<b>DAA1</b>

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya Penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Partai Perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 yang meliputi :
- a. Kecamatan Mambi adalah sama sekali tidak benar
  - b. Kecamatan Rante Bulahan Timur adalah sama sekali tidak benar;
  - c. Kecamatan Mehalaan adalah sama sekali tidak benar
  - d. Kecamatan Bambang adalah sama sekali Tidak benar
  - e. Kecamatan Aralle Adalah sama sekali Tidak Benar
  - f. Kecamatan Buntu Malangka Adalah sama sekali Tidak benar
  - g. Kecamatan Tabulahan adalah sama sekali Tidak Benar

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit



Imam Munandar, S.H., M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.



Ahmad Jazuli, S.H., M.H



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.

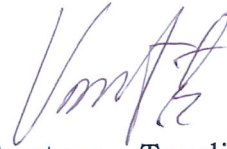
**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz,  
S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa, S.H.,  
M.H.



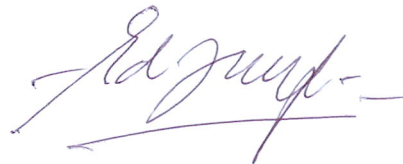
Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



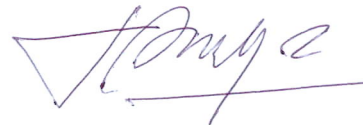
Herlin Susanto, S.H.



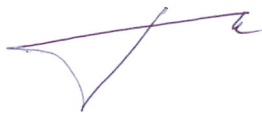
Nora Herlianto, S.H.



M. Mukhlasir R.S.K, S.H.,.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.